

BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA DEPOK



RENCANA AKSI KINERJA 2023

RENCANA AKSI KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentan waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Adapun tujuan dari perjanjian kinerja adalah untuk:

1. Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Aparatur
2. Komitmen antara penerima dan pemberi amanah
3. Dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
4. Tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur

Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Depok telah menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan Wali Kota Depok. Berdasarkan perjanjian kinerja tersebut, Kepala Perangkat Daerah Kota Depok telah membuat perjanjian kinerja dengan para Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV.

Berdasarkan perjanjian kinerja antara Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Depok dengan para Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV, maka kami menyusun Rencana Aksi Kinerja tersebut dengan menghubungkan antara rencana output/outcome yang ada dalam perjanjian kinerja dengan program/kegiatan yang ada dalam DPA Tahun 2023.

Dengan demikian, diharapkan rencana aksi kinerja tahun 2023 menjadi acuan bagi Badan Keuangan Daerah Kota Depok dalam menjalankan aktivitasnya.

Depok, Januari 2023

Kepala Badan Keuangan Daerah

Kota Depok



WAHID SURYONO, S.Pi

Pembina Tingkat I / IV b

NIP. 197409092001121004

RENCANA AKSI KINERJA
BADAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN 2023	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM KEGIATAN SUB	JADWAL KEGIATAN				KETERANGAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV	
MISI 2 : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG MODERN DAN PARTISIPATIF															
TUJUAN : TERLAKSANANYA REFORMASI BIROKRASI EFEKTIF DAN EFISIEN															
KEUANGAN															
BADAN KEUANGAN DAERAH															
1	Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Birokrasi	Predikat SAKIP BKD	72,65 (BB)					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemda						
2		Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) Pembayaran Pajak Daerah	76,95 (Baik)					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi tepat waktu	100%					
								Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen		
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19 Laporan	6 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	4 Laporan	
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase adm keuangan tepat waktu	100%					
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 Orang	105 Orang	105 Orang	105 Orang	105 Orang	
								Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran dan Sarana Prasarana Aparatur	100%					
								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 paket			
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2 paket	3 paket	4 paket	3 paket	
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	1 paket		1 Paket		
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket				2 paket	
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket				1 paket	
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah kondisi baik	100%					
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	35 Unit	5 unit	10 unit	10 unit	10 unit	
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130	30 unit	40 unit	30 unit	30 unit		
3		Opini BPK	WTP				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Status Laporan	WTP						
							Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Status Laporan	WTP						
							Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen			2 Dokumen			
							Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen			2 Dokumen			
							Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen		1 Dokumen				
							Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen			1 Dokumen			
							Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen			1 Dokumen			

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	JADWAL KEGIATAN				KETERANGAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV	
MISI 2 : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG MODERN DAN PARTISIPATIF															
TUJUAN : TERLAKSANANYA REFORMASI BIROKRASI EFEKTIF DAN EFISIEN															
								KEUANGAN							
								BADAN KEUANGAN DAERAH							
								Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		
								Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen		2 Dokumen			
								Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	80 Peserta	80 Peserta				
								Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Status Laporan	WTP					
								Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	2 Laporan		1 dokumen		1 dokumen	
								Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Aplikasi; 4 Dokumen		2 dokumen		2 dokumen	
								Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	410 Orang			410 Orang		
								Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Status Laporan	WTP					
								Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan		1 Laporan			
								Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
								Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	42 Orang			42 Orang		
								Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Status Laporan	WTP				1 Dokumen	
								Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	
								Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Status Laporan	WTP					
								Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen					
3		Opini BPK	WTP					PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%					
								Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%					
								Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen			
								Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan			
								Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		
								Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan			
								Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	
								Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	30 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	JADWAL KEGIATAN				KETERANGAN	
				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV		
MISI 2 : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG MODERN DAN PARTISIPATIF																
TUJUAN : TERLAKSANANYA REFORMASI BIROKRASI EFEKTIF DAN EFISIEN																
								KEUANGAN								
								BADAN KEUANGAN DAERAH								
								PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								
4	Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Birokrasi	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	39,40%					Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	39,40							
								Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	39,40						
								Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen		
								Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen				1 Dokumen		
								Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan					
								Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	29 Unit	10 Unit	19 Unit				
								Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan					1 Laporan	
								Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				
								Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	660000 Objek Pajak	660000 Objek Pajak					
								Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
								Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	11 Layanan	4 Layanan	4 Layanan	3 Layanan			
								Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	7200 Dokumen	4050 Dokumen	1350 Dokumen	900 Dokumen	900 Dokumen		
								Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen					1 Dokumen	
								Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	50 Dokumen	30 Dokumen	16 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		
					JUMLAH ANGGARAN											

Depok, Januari 2023

Kepala

Badan Keuangan Daerah

Kota Depok



WAHID SURYONO, S.Pi
NIP. 197409092001121004